

JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah: Ekonomi Pendidikan

Nama : Diva Rihhadatul Zahria

NPM : 2313031076

Kelas : 2023 C

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.
2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban:

1. Kalau kita lihat dari kasus Kabupaten A, penggunaan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD itu sebenarnya sudah cukup besar. Masalahnya ada di cara pengalokasiannya yang kurang tepat sasaran.

Dari sisi efisiensi internal, kondisinya bisa dibilang kurang efisien. Efisiensi internal itu melihat seberapa baik proses di dalam sistem pendidikan itu sendiri apakah input yang diberikan (dana, guru, fasilitas) menghasilkan output pendidikan yang baik seperti tingkat kelulusan, prestasi siswa, dan kualitas pembelajaran. Nah, di Kabupaten A ini dananya banyak tapi justru sebagian besar dihabiskan untuk pembangunan gedung, sedangkan hal-hal yang langsung memengaruhi kualitas belajar-mengajar seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media pembelajaran digital malah sangat terbatas. Akibatnya wajar kalau kualitas hasil belajar siswa tidak meningkat, karena gurunya tidak terlatih dengan baik dan proses pembelajaran di dalam kelas tidak berkualitas.

Dari sisi efisiensi eksternal, situasinya juga bermasalah. Efisiensi eksternal mengukur seberapa besar kontribusi pendidikan terhadap output di luar sistem pendidikan, misalnya kontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kualitas hasil belajar siswa tidak meningkat meskipun partisipasi sekolah naik, maka lulusan yang dihasilkan tidak akan siap bersaing di dunia kerja. Ini berarti investasi pendidikan tidak memberikan return yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Gedung bagus tapi kualitas SDM tidak meningkat sama saja pemborosan anggaran.

2. Dampak yang paling terasa tentu adalah kualitas sumber daya manusia yang stagnan. Angka partisipasi sekolah memang naik, artinya lebih banyak anak yang bersekolah, tapi kalau pengalaman belajarnya tidak berkualitas maka yang dihasilkan adalah

lulusan yang secara kuantitas banyak tapi secara kompetensi lemah. Ini akan berdampak jangka panjang karena SDM yang tidak kompeten sulit bersaing di pasar kerja, produktivitas rendah, dan pada akhirnya menghambat pembangunan ekonomi daerah.

Rekomendasi yang menurut saya perlu dilakukan adalah:

- Mereorientasi alokasi anggaran agar lebih banyak untuk peningkatan kualitas pembelajaran seperti pelatihan dan sertifikasi guru, pengembangan bahan ajar, dan pengadaan teknologi pendidikan.
- Menerapkan sistem evaluasi dan monitoring berbasis output, bukan hanya input. Jadi anggaran tidak hanya dilihat dari sudah habis dipakai atau belum, tapi juga apakah benar-benar menghasilkan perubahan pada kualitas pendidikan.
- Pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan tapi diprioritaskan di daerah yang memang belum memiliki gedung memadai, bukan dilakukan merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.
2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan. Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut

Jawaban:

1. Ketimpangan yang tergambar di kasus ini sangat jelas dan berlapis. Ada ketimpangan input, proses, dan output sekaligus.
Dari sisi input, sekolah kota punya laboratorium lengkap, internet cepat, dan guru profesional, sementara sekolah desa kekurangan guru, fasilitas minim, dan teknologi terbatas. Ini adalah ketimpangan sumber daya yang fundamental. Ketimpangan proses terlihat dari kualitas pembelajaran yang berbeda jauh di kota proses belajar bisa memanfaatkan teknologi dan diampu guru berkualitas, sementara di desa prosesnya terbatas. Dan pada akhirnya muncul ketimpangan output: hasil ujian siswa desa jauh lebih rendah dari siswa kota.
Kalau mengacu pada konsep keadilan dalam pendidikan, kondisi ini menunjukkan ketidakadilan horizontal (perbedaan antar wilayah yang berada dalam satu sistem pendidikan yang sama) dan vertikal (anak dari keluarga yang berbeda latar belakang mendapat kualitas pendidikan yang berbeda). Ini melanggar prinsip equal opportunity dalam pendidikan.
2. Dampak ekonomi jangka panjangnya cukup serius. Anak-anak dari desa yang mendapat pendidikan berkualitas rendah akan tumbuh menjadi tenaga kerja dengan kompetensi terbatas, sehingga mereka cenderung bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Ini akan melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi. Sementara itu,

ketimpangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan akan semakin melebar karena ada perbedaan dalam human capital yang dimiliki.

Dari perspektif makroekonomi, ketimpangan pendidikan yang dibiarkan juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan karena potensi SDM di daerah tidak bisa berkembang optimal.

Solusi yang bisa diusulkan antara lain:

- Program distribusi guru yang lebih adil, termasuk insentif finansial (tunjangan daerah terpencil) dan non-finansial yang menarik agar guru mau ditempatkan di daerah pedesaan.
- Anggaran pendidikan daerah diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas, bukan sekolah yang sudah lengkap.
- Memperluas program bantuan teknologi dan internet ke sekolah-sekolah di desa sebagai bagian dari pemerataan akses digital.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.
2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut. Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Jawaban:

1. Teori human capital, yang dipopulerkan oleh Gary Becker, pada dasarnya berargumen bahwa investasi pendidikan akan meningkatkan produktivitas individu sehingga meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya. Tapi kasus Kota B ini justru memperlihatkan sisi lain dari teori tersebut investasi pendidikan yang tidak tepat sasaran tidak otomatis menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan terserap pasar. Penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori ini ada beberapa. Pertama, ada mismatch antara jenis human capital yang diproduksi oleh perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan industri. Artinya, mahasiswa memang berinvestasi dalam pendidikan, tapi investasi itu tidak menghasilkan skill yang relevan. Kedua, kualitas pendidikannya sendiri mungkin tidak cukup baik sehingga meskipun lulusan ada ijazah, kompetensi nyatanya tidak memenuhi standar industri. Ketiga, kurangnya link and match antara dunia akademik dan dunia kerja, sehingga kurikulum tidak update mengikuti perkembangan kebutuhan industri.
2. Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja seharusnya bersifat saling melengkapi pendidikan mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, dan industri menyerap tenaga kerja terdidik tersebut. Tapi di Kota B, hubungan ini terputus. Perguruan tinggi berjalan sendiri tanpa cukup mempertimbangkan apa yang benar-benar dibutuhkan dunia usaha.

Beberapa rekomendasi yang menurut saya relevan:

- Perguruan tinggi perlu lebih aktif berkolaborasi dengan industri dalam merancang kurikulum, sehingga materi kuliah lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja nyata.

- Memperbanyak program magang wajib yang bermakna, bukan sekadar formalitas, agar mahasiswa mendapat pengalaman kerja nyata sebelum lulus.
- Pemerintah perlu memfasilitasi forum rutin antara perguruan tinggi dan asosiasi industri untuk membicarakan kebutuhan tenaga kerja ke depan, sehingga perguruan tinggi bisa menyesuaikan program studinya.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.
2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.
3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

1. Ini menarik karena pendidikan sebenarnya mengandung karakteristik keduanya. Sebagai barang publik, pendidikan memiliki eksternalitas positif yang besar masyarakat yang terdidik akan lebih produktif, lebih sehat, lebih taat hukum, dan itu menguntungkan semua pihak, bukan hanya individu yang bersangkutan. Karena itulah negara biasanya terlibat dalam membiayai dan menyelenggarakan pendidikan. Tapi di sisi lain, pendidikan juga memiliki sifat barang privat, manfaatnya sebagian besar dinikmati langsung oleh individu yang mengenyam pendidikan itu sendiri (seperti peningkatan karir dan penghasilan). Universitas swasta dalam kasus ini berargumen dari sudut pandang barang privat: kamu yang menikmati manfaatnya, kamu yang menanggung biayanya
Kenaikan UKT 25% memang bisa dibenarkan dari perspektif bisnis, tapi ketika itu menjadi penghalang bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi, maka aspek keadilan sosial menjadi terganggu.
2. Dampak sosialnya cukup berat, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. Kenaikan UKT bisa menyebabkan sebagian mahasiswa terpaksa drop out atau tidak jadi melanjutkan pendidikan tinggi. Ini bukan hanya merugikan individu itu sendiri, tapi juga memperburuk ketimpangan sosial karena akses terhadap pendidikan tinggi semakin terbatas hanya bagi yang mampu secara finansial.
Dari sisi ekonomi, ini bisa memperlemah kualitas angkatan kerja terdidik di masa depan karena sebagian potensi yang harusnya bisa mengenyam pendidikan tinggi jadi terputus di tengah jalan. Jangka panjangnya, ini menghambat akumulasi human capital yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.
3. Menurut saya, iya, pemerintah perlu melakukan intervensi tapi bukan dengan cara memaksa universitas swasta untuk tidak menaikkan biaya, karena itu bisa mengganggu keberlangsungan operasional mereka.
Intervensi yang lebih tepat adalah melalui sisi demand: memperluas dan memperkuat skema beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu,

mempermudah akses kredit pendidikan dengan bunga rendah, serta mendorong transparansi dalam penggunaan dana universitas agar kenaikan biaya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah juga bisa memberikan insentif kepada universitas yang tetap menjaga keterjangkauan biaya bagi mahasiswa kurang mampu.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Kasus

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.
2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan. Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawaban:

1. Dalam konsep biaya pendidikan, ada yang disebut biaya langsung (seperti membeli perangkat dan kuota internet) dan biaya tidak langsung. Nah, dalam kasus digitalisasi pasca pandemi ini, biaya langsung untuk bisa mengikuti pembelajaran digital menjadi penghalang nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Membeli laptop atau smartphone dan membayar kuota internet setiap bulan itu bukan angka kecil bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan.

Dari sisi opportunity cost, situasinya lebih kompleks lagi. Ketika anak dari keluarga miskin tidak bisa mengikuti pembelajaran digital karena tidak punya perangkat, ia kehilangan kesempatan belajar yang tidak bisa diulang. Tapi lebih jauh dari itu, sebagian dari mereka mungkin akhirnya memilih bekerja untuk membantu keluarga daripada bersekolah karena toh tidak bisa belajar dengan baik juga. Ini berarti biaya kesempatan dari pendidikannya semakin tinggi, dan insentif untuk tetap bersekolah semakin rendah.

2. Kesenjangan digital memperparah ketimpangan pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Siswa yang punya akses teknologi bisa terus belajar, mengakses materi tambahan di internet, dan berinteraksi dengan guru secara daring. Sementara siswa tanpa akses teknologi tertinggal makin jauh. Kualitas pendidikan mereka tidak hanya tidak berkembang, tapi bisa menurun karena proses pembelajaran yang tidak optimal. Dalam jangka panjang ini akan menciptakan generasi yang terbagi dua: mereka yang melek teknologi dan punya daya saing tinggi, dan mereka yang tertinggal dan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Ini adalah ancaman nyata bagi pembangunan SDM nasional.

Solusi kebijakan yang bisa diambil:

- Pemerintah menyediakan subsidi atau program pinjaman perangkat belajar bagi siswa dari keluarga tidak mampu, misalnya melalui program laptop/tablet sekolah.
- Memperluas infrastruktur internet ke daerah-daerah yang belum terjangkau, termasuk pemasangan wifi gratis di titik-titik strategis seperti sekolah, balai desa, dan perpustakaan umum.

- Dalam jangka pendek, sekolah bisa menerapkan model pembelajaran hibrida yang tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi digital, sehingga siswa yang tidak punya perangkat tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan cara lain.
- Bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyediakan kuota internet murah atau gratis khusus untuk keperluan pembelajaran bagi siswa dari keluarga tidak mampu.